

Prioritas Pembangunan Politik serta Pertahanan dan Keamanan 2005 – 2009 ¹

Oleh : Bijah Subijanto^{†)}

Kondisi awal (dan problematika)

Indikasi kemajuan. Meskipun masih bersifat debatable, namun harus diakui bahwa krisis multidimensi yang dihadapi oleh bangsa Indonesia sejak tahun 1998 secara perlahan telah terlihat adanya indikasi proses pemulihan.

Di bidang keamanan, berbagai konflik sosial yang terjadi di Maluku, Kalimantan, dan Sulawesi dapat diredam. Masalah di Nanggroe Aceh Darussalam yang membahayakan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia telah memasuki tahapan penyelesaian; masalah di Papua dan Maluku tengah diupayakan secara komprehensif. Gangguan keamanan dan kejahatan konvensional yang timbul sebagai akibat dari krisis multidimensi semakin dapat dikendalikan. Kejahatan transnasional yang meningkat intensitasnya, dalam tingkatan terbatas dapat ditangani secara hukum.

Di bidang politik, proses demokratisasi perlahan-lahan makin memproses ke nilai-nilai demokrasi dalam penyelenggaraan negara. Dalam takaran yang terbatas, masyarakat menunjukkan keinginan untuk turut serta dalam proses pengambilan keputusan politik yang berkaitan dengan kepentingannya. Melalui kematangan partai-partai politik, kesadaran partisipasi politik masyarakat makin mempercepat proses tersebut.

Di bidang hukum, terjadi perubahan yang cukup mendasar di bidang ketatanegaraan antara lain dengan pembentukan Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial, serta perimbangan kekuasaan Presiden, DPR, MPR, dan Mahkamah Agung. Melalui Perpu No. 1 Tahun 1998 (Perubahan Atas UU Tentang Kepailitan) dibentuk pengadilan niaga untuk membantu kepentingan dunia usaha dalam penyelesaian masalah utang-piutang.

Di bidang ekonomi, meskipun masih perlu pembuktian dengan perjalanan waktu, sepertinya stabilitas ekonomi cenderung meningkat. Sejak awal tahun 2002, nilai tukar rupiah relatif stabil dengan kecenderungan menguat, laju inflasi dan suku bunga menurun, serta cadangan devisa meningkat. Ketahanan fiskal juga cenderung menguat dicerminkan dengan semakin menurunnya defisit anggaran dan stok utang pemerintah. Rangkaian kemajuan ini mendorong keyakinan untuk mengakhiri program kerja sama dengan IMF.

Di bidang pembangunan daerah, terjadi perubahan yang cukup mendasar pada tata pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota melakukan terobosan-terobosan sesuai dengan kewenangannya. Pemerintah daerah melakukan reorganisasi kelembagaan, penempatan sumber daya manusia aparatur Pemda, pengelolaan keuangan daerah, dan pengembangan kapasitas anggota legislatif di daerah.

^{†)} Dielaborasi kembali dan disampaikan pada diskusi tentang Arah Pembangunan Partai Politik yang diselenggarakan oleh Pro-Patria, di Hotel Peninsula, Jakarta, 28 Januari 2004.

^{†)} Prof. Dr. Ir Bijah Subijanto, MSIE ; adalah praktisi di bidang pembangunan politik, pertahanan, dan keamanan dan pada saat ini menjabat sebagai Kepala Lembaga Penelitian Universitas Pancasila Jakarta.

Sedangkan, dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia diikuti oleh meningkatnya kehidupan beragama di kalangan masyarakat antara lain dengan meningkatnya kegiatan-kegiatan keagamaan yang turut berperan dalam meredam konflik sosial yang terjadi di beberapa wilayah di tanah air.

Potensi permasalahan. Meskipun telah dicapai beberapa kemajuan di berbagai bidang pembangunan, namun masalah-masalah yang akan dihadapi dalam kurun waktu lima tahun mendatang masih cukup besar.

Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Kesejahteraan Rakyat Serta Lemahnya Ketahanan Budaya. Meskipun meningkat, kualitas sumber daya manusia masih jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara ASEAN. Ini tercermin dari menurunnya peringkat Indeks Pembangunan Manusia [IPM] yang meliputi angka harapan hidup, angka melek huruf, angka partisipasi pendidikan, dan PDB per kapita riil. Berdasarkan *Human Development Report 2003*, IPM Indonesia hanya menempati urutan ke 112 dari 175 negara. Sedangkan apabila dipilah menurut jenis kelamin, dengan menggunakan Indeks Pembangunan Gender [IPG], Indonesia hanya menempati urutan ke 91 dari 114 negara. Peningkatan kualitas sumber daya manusia juga dihadapkan pada beban yang berat dengan masih besarnya jumlah penduduk miskin dan rendahnya tingkat pendidikan angkatan kerja yang didominasi oleh lulusan SD ke bawah. Kompleksitas penanganan sumber daya manusia juga semakin meningkat dengan persebaran penduduk yang tidak merata terutama ke Jawa dan daerah perkotaan.

Menurunnya Daya Dorong Perekonomian. Meskipun terjadi peningkatan stabilitas ekonomi, kegiatan ekonomi belum tumbuh sebagaimana yang ditargetkan. Dalam tahun 2000-2002, perekonomian hanya tumbuh rata-rata sekitar 4,0 persen per tahun; jauh lebih rendah dibandingkan dengan sebelum krisis yang mampu tumbuh rata-rata sekitar 7 persen per tahun. Lambatnya pertumbuhan ekonomi ini disebabkan oleh belum pulihnya investasi serta lemahnya kinerja ekspor non-migas yang pada gilirannya menekan pertumbuhan sektor industri yang selama ini menjadi penggerak pertumbuhan. Apalagi situasi perekonomian pada tahun 2000 yang hampir semua negara diuntungkan oleh pertumbuhan ekonomi dunia yang tinggi, investasi dan kinerja ekspor kurang mampu bersaing dalam lingkungan eksternal yang makin kompetitif. Pertumbuhan ekonomi ini mengakibatkan rendahnya penciptaan lapangan kerja. Sehingga, dalam tahun 2002, pengangguran terbuka meningkat menjadi 9,1 juta jiwa, 99,1 persen dari total angkatan kerja) yang pada gilirannya tidak akan mampu mengurangi jumlah penduduk miskin. Walhasil, jumlah penduduk miskin mencapai 38,4 juta jiwa (18,2 persen), sementara jumlah pekerja formal di perkotaan berkurang 0,47 juta orang dan di pedesaan berkurang 1,1 juta orang.

Menipisnya Sumber Daya Alam Dan Menurunkan Daya Dukung Lingkungan. Meningkatnya kegiatan ekonomi menyebabkan meningkatnya permintaan terhadap barang dan jasa, terutama yang disediakan alam. Kecenderungan ini tercermin dari meningkatnya kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam yang mengakibatkan tekanan terhadap keberadaan sumber daya alam. Ini akan menurunkan kualitas (degradasi) dan kuantitas (depleksi) sumber daya alam, yang pada akhirnya mengancam kelangsungan kehidupan manusia. Kondisi tersebut juga sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk yang pesat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi dengan penerapan yang tidak ramah lingkungan, dan kurangnya etika dan perilaku yang berpihak

pada kepentingan pelestarian lingkungan. Ketiga faktor tersebut akhirnya menyebabkan penerapan iptek lebih dimanfaatkan bagi pertumbuhan ekonomi yang tinggi melalui eksploitasi sumber daya alam yang berujung pada kerusakan lingkungan. Kerusakan yang terjadi tidak hanya terbatas pada fisik tetapi juga mengarah pada lingkungan sosial dan budaya, seperti kemiskinan, kelaparan, pelanggaran HAM, dan kepunahan nilai-nilai budaya masyarakat.

Masih Tingginya Kesenjangan Antar Daerah. Disamping berbagai kemajuan yang sudah dicapai, pembangunan daerah dihadapkan pada permasalahan pokok berupa meningkatnya kesenjangan antara Jawa - Luar Jawa, antara Kawasan Barat Indonesia - Kawasan Timur Indonesia, serta antara kota - desa. Pertumbuhan yang tidak seimbang antara kota-kota besar/metropolitan dengan kota-kota menengah dan kecil dengan pemusatan ekonomi di pulau Jawa - Bali serta pertumbuhan kota-kota menengah dan kecil serta kawasan pedesaan yang berjalan lambat mengakibatkan berbagai kesenjangan tersebut diatas. Disamping itu, kemampuan masing-masing daerah tidak merata dalam kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, pengelolaan keuangan, dan kapasitas anggota legislatif. Pengembangan wilayah tertinggal dan wilayah perbatasan dihadapkan pada banyaknya wilayah tertinggal yang harus ditangani yang tersebar luas di seluruh pelosok serta panjangnya garis perbatasan darat antar negara dan banyaknya pulau-pulau terluar yang tidak berpenghuni. Sedangkan pengembangan kawasan strategi dan cepat tumbuh dihadapkan pada kurangnya kesiapan daerah dalam memanfaatkan peluang yang ada, terbatasnya sumber daya manusia, rendahnya peranan swasta dalam pembangunan, serta terbatasnya jaringan sarana dan prasarana fisik dan ekonomi di daerah.

Lemahnya Supremasi Hukum. Meskipun beberapa kemajuan dicapai di bidang hukum, masih banyak didapati produk hukum yang tidak sejalan satu dengan lainnya. Disamping itu juga masih terdapat produk hukum yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga menimbulkan resistensi di dalam penerapannya. Sementara itu terjadi peningkatan apatisme masyarakat terhadap penegakan hukum yang dianggap telah meninggalkan nilai-nilai keadilan, diskriminatif serta kehilangan impartialitas di dalam menangani berbagai kasus. Akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap penegakan hukum berada pada tahap yang memprihatinkan dan dapat menjauhkan dari upaya untuk mewujudkan supremasi hukum. Selanjutnya tingkat kesejahteraan aparat hukum telah menjadi pembenaran terjadinya korupsi. Kondisi ini berpengaruh buruk terhadap upaya pembangunan hukum sehingga penegakan hukum tidak dapat dilakukan secara penuh.

Belum Mantapnya Proses Demokratisasi Dan Masih Adanya Potensi Disintegrasi Bangsa. Meskipun proses demokratisasi berjalan secara perlahan, pembangunan politik masih dihadapkan pada beberapa kendala. Pada saat proses politik yang demokratis dan penegakan hukum sangat diperlukan, terjadi penurunan kepercayaan masyarakat luas terhadap lembaga politik yang ada. Budaya politik juga masih diwarnai mentalitas primordial, belum beralih ke budaya politik modern yang menjunjung tinggi hukum. Sementara itu potensi disintegrasi bangsa masih ada. Komitmen terhadap bangsa dan negara yang belum sepenuhnya utuh, primordialisme, dan pemahaman yang sempit terhadap otonomi daerah berpotensi sebagai faktor disintegrasi bangsa. Hal ini makin memperumit bangsa Indonesia dalam mengatasi instabilitas regional di sekitar Indonesia, yang antara lain disebabkan oleh ketidakpastian peta kekuatan militer dunia. Disintegrasi bangsa dan instabilitas regional tersebut dapat menjadi ancaman terhadap kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Membangun Politik yang berkeadaban (Civilized)

Latar belakang. Perubahan struktur politik Indonesia dalam proses demokratisasi telah dilakukan, paling tidak meliputi enam masalah dasarnya. *Pertama*, tuntasnya amandemen (I, II, III, dan IV) UUD 1945 yang secara mendasar telah mengubah dasar-dasar konsensus dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. *Kedua*, terciptanya format politik baru dengan disahkannya perundang-undangan baru bidang politik, pemilu, dan susunan kedudukan MPR dan DPR, yang menjadi dasar pelaksanaan Pemilu 2004. *Ketiga*, terciptanya format hubungan pusat-daerah yang baru berdasarkan perundang-undangan otonomi daerah yang baru. *Keempat*, terciptanya konsensus mengenai format baru hubungan sipil-militer dan TNI dengan Polri berdasarkan ketetapan-ketetapan MPR dan perundang-undangan baru bidang pertahanan dan keamanan. *Kelima*, disepakatinya pelaksanaan pemilihan presiden secara langsung di dalam konstitusi dan akan dituangkan dalam bentuk perundang-undangan. *Keenam*, kesepakatan mengenai akan diakhirinya pengangkatan TNI/Polri dan Utusan Golongan di dalam komposisi parlemen hasil Pemilu 2004 mendatang.

Kendatipun demikian, belum mampu mengangkat secara signifikan proses-proses politik (dan budaya politik) ke posisi yang lebih demokratis dan lebih berkeadilan. Kesenjangan pembangunan sistem politik dengan proses politik dan budaya politik ini dipengaruhi beberapa faktor yang antara lain; *Pertama*, negara ternyata sedang mengalami krisis peran, dalam proses mencari keseimbangan dan otoritas baru yang lebih kondusif bagi kehidupan yang demokratis. Dominasi dan belenggu otoritarian yang berlangsung cukup lama, mengakibatkan masyarakat (dan juga birokrat, politisi, akademisi, dll) kurang memiliki referensi yang cukup mengenai batas-batas peran yang ideal bagi negara dan pembagian kekuasaan para aparatur negara dalam sistem yang demokratis. *Kedua*, masyarakat masih mengalami kebingungan dan frustrasi terhadap berbagai praktek penyelenggaraan negara. Kebingungan dan frustrasi tersebut tercermin dalam berbagai tindakan destruktif yang tidak jarang bersifat irasional dan cenderung eksemis dalam kehidupan sosial. Kecenderungan ini dapat dilihat pada tindakan main hakim sendiri dengan menggunakan kekerasan secara melawan hukum. Dengan tidak mengabaikan kemungkinan adanya kesengajaan dan rekayasa politis untuk membuat situasi sosial dan politik yang demikian itu. Namun hal ini bisa menjadi cermin dari berkurangnya kepercayaan masyarakat kepada proses-proses politik, terutama yang dimainkan partai-partai politik dan proses-proses hukum yang berlaku secara normal. Konflik-konflik internal di partai politik makin meningkatkan ketidakpercayaan masyarakat pada proses-proses politik tersebut. *Ketiga*, ancaman terhadap persatuan nasional makin serius dengan masih berkembangnya politik aliran agama sebagai bagian dari pertentangan kepentingan politik dan kekuasaan. Selama beberapa tahun terakhir, iklim kebebasan telah membuat kelompok primordial menegaskan keberadaannya identitasnya di dalam masyarakat. Amat sering terjadi kekerasan dilakukan terhadap kelompok lain yang tidak sepaham, dengan menggunakan agama atau primordial sebagai perisai.

Oleh karena itu, dalam membangun politik yang berkeadaban harus dilakukan secara menyeluruh dan terpadu antara struktur politik, proses politik, budaya politik, penataan peran negara dan masyarakat, hubungan luar negeri, dan sistem informasi komunikasi, sebagaimana berikut;

Struktur politik. Penyempurnaan struktur politik dilakukan dengan: (a) Meningkatkan independensi, kapasitas dan integritas lembaga Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial sebagai bagian dari upaya memperkuat wibawa dan kepastian konstitusional dalam proses penyelenggaraan negara; Sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh konstitusi, baik Mahkamah Konstitusi maupun Komisi Yudisial menempati posisi sangat penting untuk memelihara *check and balances* antara lembaga-lembaga penyelenggara negara; (b) Mengupayakan langkah-langkah politik perumusan yang lebih menyeluruh terhadap semua peraturan perundangan yang berkaitan dengan pertahanan keamanan negara; Perumusan yang tegas dan jelas atas tugas-tugas pertahanan dan keamanan akan sangat membantu upaya meningkatkan profesionalisme TNI/Polri dan menjaga netralitas politik kedua lembaga tersebut; (c) Menyempurnakan semua aspek-aspek yang berkaitan dengan hubungan *checks and balances* di antara lembaga-lembaga penyelenggara negara, dengan tekanan cukup besar diharapkan pada penguatan posisi DPD (Dewan Perwakilan Daerah) dan efektivitas politik lembaga kepresidenan; Posisi DPD masih belum cukup mampu mengimbangi kedudukan DPR, sehingga dianggap perlu untuk memberikan kekuasaan yang lebih besar, sejalan dengan otonomi daerah. Di lain pihak, presiden sebagai lembaga eksekutif, dianggap belum memiliki wewenang yang efektif dalam melaksanakan tugas-tugas konstitusionalnya; (d) Merumuskan sistem politik yang lebih jelas terhadap pembagian wewenang dan tanggung jawab politik yang lebih adil antara Pusat- Daerah dalam proses desentralisasi; Berbagai peraturan perundangan yang ada dewasa dapat dianggap belum mampu merumuskan secara komprehensif mengenai otonomi daerah, serta belum mampu mengatur dan mengakomodasikan secara jelas berbagai kepentingan yang saling bertentangan antara pusat dengan daerah, serta antara daerah satu dengan daerah lainnya; (e) Merumuskan aspek-aspek politik bagi upaya pelembagaan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) sebagai prasyarat terciptanya budaya politik yang egaliter, toleran dan damai; Upaya-upaya rekonsiliasi yang terlembaga bukanlah dimaksudkan untuk menggantikan lembaga pengadilan, melainkan lebih difokuskan pada penyelesaian konflik-konflik di masa lalu secara politik; (f) Memfasilitasi dan mengupayakan percepatan politik bagi dilakukannya *judicial review* atas peraturan perundangan yang berkaitan dengan pemilu dan partai politik, berkenaan dengan rumusan-rumusan yang dianggap kontroversial bagi upaya proses demokratisasi; Peraturan perundangan mengenai Pemilu dan Parpol harus diupayakan untuk lebih netral dan bersih dari segala bentuk *vested interest* yang bersifat sementara, serta diharapkan mampu mengakomodasikan asas-asas demokrasi yang umum secara adil dan bertanggung jawab.

Penataan Peran negara dan masyarakat. Penataan peran negara dan masyarakat dilakukan dengan: (a) Mempermudah persyaratan bagi kemungkinan studi lanjutan di semua tingkat dan jenis pendidikan, baik di dalam maupun di luar negeri, bagi masyarakat luas, sebagai bagian upaya memperkuat kelas menengah terdidik dalam masyarakat; Pendidikan adalah salah satu jalur terpenting dalam rangka memperkuat civil society yang bercirikan kecerdasan, kesadaran dan inisiatif politik tinggi; (b) Mewujudkan keleluasaan yang lebih besar bagi Ornop dan Ormas dalam mendapatkan sumber daya operasional masing-masing sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; Pemerintah mempunyai kepentingan terhadap Ornop dan Ormas yang kuat dan mandiri, sebagai mitra dalam proses pemberdayaan masyarakat; (c) Memelihara dan memperkuat pranata-pranata adat dan lembaga sosial budaya tradisional di daerah-daerah agar tetap mandiri dari

pengaruh negara dan dipercaya masyarakat; Pranata-pranata kemasyarakatan tradisional merupakan aset bangsa yang perlu dipelihara, karena di dalamnya tertanam nilai-nilai luhur masyarakat bersangkutan, dalam memelihara harmoni dan keseimbangan sosial budaya; (d) Memfasilitasi upaya pemberdayaan organisasi-organisasi profesi guna ikut serta memberikan masukan dan melaksanakan pengawasan secara kritis terhadap proses pengambilan keputusan publik di bidangnya masing-masing; Proses pengambilan keputusan politik diharapkan melibatkan sebanyak mungkin kalangan profesional, guna menghasilkan produk kebijakan yang mengakomodasikan kepentingan masyarakat luas.

Budaya politik. Pengembangan budaya politik dilakukan dengan: (a) Memfasilitasi dan mengkondisikan upaya politik bagi penyempurnaan kurikulum sekolah-sekolah negeri dengan muatan budaya (*cultural matters*) berintikan nilai-nilai budaya (*cultural values*) Demokrasi, HAM dan Etika Politik; Penyempurnaan pendidikan mencakup metode pendidikan maupun substansi pendidikan dengan sasaran utama membentuk sejak dini kepribadian dan sikap manusia Indonesia yang toleran, memahami nilai-nilai etika politik dan persamaan (*egalitarianism*) yang diperlukan oleh sebuah civil society; (b) Memfasilitasi dan mengkondisikan munculnya fora dan wacana-wacana sosial politik yang dapat memperdalam pemahaman mengenai pentingnya persatuan bangsa, mengikis sikap diskriminatif, dan menghormati perbedaan-perbedaan dalam masyarakat; Media massa cetak dan penyiaran sebagai alat komunikasi dan informasi umum dapat diikutsertakan dalam upaya mempromosikan nilai-nilai persatuan dan persamaan secara sosial.

Proses politik. Perbaikan proses politik dilakukan dengan: (a) Menciptakan iklim kompetisi yang sehat bagi penyelenggaraan perdebatan terbuka calon pemimpin nasional; Pola-pola perdebatan antara calon presiden yang sudah dilaksanakan oleh negara-negara demokrasi maju dapat dijadikan acuan, untuk menguji integritas dan visi kepemimpinan dari para calon; (b) Meningkatkan kualitas uji kelayakan bagi rekrutmen pejabat politik dan publik; Metode uji kelayakan yang sudah berjalan selama ini di DPR, perlu diperluas jangkauannya ke berbagai tingkat dan diperbaiki kualitasnya, serta dengan keterbukaan yang lebih besar terhadap penilaian masyarakat umum; (c) Membuka berbagai wacana dan forum untuk mengembangkan proses komunikasi politik yang lebih sehat, bebas dan efektif; Wacana komunikasi yang sehat sangat berhubungan erat dengan terbukanya arus informasi media massa serta keterbukaan sumber-sumber informasi lainnya.

Hubungan luar negeri. Program pembangunan hubungan luar negeri diwujudkan melalui program-program pemantapan politik luar negeri, peningkatan kerjasama internasional, serta penegasan komitmen perdamaian. Pemantapan politik luar negeri dilakukan dengan: (a) Memberikan respons yang lebih tegas, visioner dan berkualitas berkaitan dengan isu-isu internasional strategis dalam setiap periode tertentu; Sebagai negara demokrasi yang besar, respons yang tegas dan konsisten diharapkan dapat mempengaruhi dan membentuk opini masyarakat internasional, terutama dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional; (b) Meratifikasikan berbagai konvensi internasional yang sejalan dengan kepentingan nasional dalam membangun demokrasi, keamanan nasional dan penerapan nilai-nilai HAM; Konsistensi dalam menjalankan proses demokratisasi dapat meningkatkan citra Indonesia di dunia internasional.

Peningkatan kerjasama internasional dilakukan dengan: (a) Meningkatkan kesepahaman dan koordinasi yang lebih terarah antara lembaga-lembaga Deplu, Dephankam, Polkam, TNI/Polri dan intelijen untuk bekerjasama dengan lembaga-lembaga mitra dari negara-negara tetangga bagi meningkatkan saling pengertian dalam upaya menjaga keamanan kawasan, integritas wilayah dan pengamanan kekayaan sumber daya alam nasional; Berbagai upaya subversi dan tindakan kriminal lintas batas yang semakin meningkat kualitasnya, diharapkan dapat ditanggapi dengan kerjasama dan koordinasi yang lebih baik antar negara-negara yang bertetangga, seperti pertukaran data dan informasi intelijen; (b) Mengupayakan terbentuknya ASEAN *Economic Community* selama Indonesia menjadi *chairman ASEAN Standing Committee*, sebagai basis bagi terbentuknya ASEAN *Security Community* dalam jangka panjang; Kesepakatan ASEAN Concord II pada KTT ASEAN 2003 di Bali perlu dilaksanakan secara konsisten dan terpadu, sekaligus menegaskan kembali kepeloporan Indonesia, sebagai salah satu pendiri ASEAN.

Penegasan komitmen perdamaian dilakukan dengan: (a) Mengevaluasi aspek-aspek politik untuk memperkuat konsep dasar keberadaan lembaga mediator yang independen sebagai salah satu model bagi penyelesaian berbagai konflik secara damai di masa mendatang; Pada saat peran dan wibawa PBB sebagai lembaga multilateral terlihat sedang menurun, lembaga-lembaga mediator di luar PBB dapat mengambil peran penting sebagai alternatif; (b) Memperluas dan memfasilitasi jaringan diplomasi kebudayaan dan pendidikan berbasiskan inisiatif masyarakat secara luas; Diplomasi kebudayaan dan pendidikan diharapkan dapat melengkapi diplomasi politik, serta diproyeksikan dapat mendorong pemahaman yang lebih mendalam terhadap berbagai kepentingan yang berbeda dalam hubungan antar bangsa, serta membantu perumusan titik-titik persamaan antara nilai-nilai yang berbeda; (c) Memperluas jaringan *Sister City* antara kota-kota di Indonesia dengan kota-kota mancanegara yang sudah berkembang dan maju; Aspek-aspek yang baik dalam pengelolaan kota dan warga kota di negara-negara demokrasi dapat menjadi pelajaran dalam pengelolaan kota secara efisien; (d) Lebih proaktif bagi penyelesaian konflik Palestina dan pengakhiran penduduk Israel secara adil melalui PBB, sebagai bagian dari upaya ikut menciptakan perdamaian dunia; Sebagai konflik sudah berlangsung lebih dari 55 tahun, konflik Israel-Palestina dapat memberikan dampak yang makin luas secara global. Oleh karena itulah, semua saluran diplomasi perlu digunakan untuk ikut membantu menyelesaikan persoalan besar ini.

Sistem informasi dan komunikasi. Program pembangunan komunikasi dan informasi diwujudkan melalui program-program pengembangan pers dan media massa, peningkatan prasarana penyiaran dan jaringan informasi; serta peningkatan kualitas pelayanan informasi publik. Pengembangan pers dan media massa dilakukan dengan: (a) Memfasilitasi dan mereview atas aspek-aspek politik terhadap peraturan perundangan yang berkaitan dengan pers dan media massa, terutama yang berkenaan dengan rumusan-rumusan yang dianggap kontroversial bagi kebebasan pers dan proses demokratisasi; Pers adalah lembaga yang sangat penting dalam menjaga transparansi politik dan menjaga hak masyarakat memperoleh informasi yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu kebebasan dan independensinya perlu dipelihara secara bersama-sama; (b) Meningkatkan upaya pengkajian dan penelitian dalam rangka pengembangan informasi dan komunikasi; Pers yang baik bercirikan antara lain memiliki kemampuan menciptakan tradisi pers yang menganut prinsip *precision journalism* (berdasarkan *investigative reporting*).

Peningkatan prasarana penyiaran dan jaringan informasi dilakukan dengan: (a) memfasilitasi dan memperluas jaringan informasi dan penyiaran publik, khususnya di daerah-daerah yang masih terpencil; Informasi adalah modal yang sangat penting dalam upaya pemberdayaan masyarakat, membangun persepsi yang tepat terhadap diri dan lingkungannya, serta meletakkan hak dan kewajibannya secara tepat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; (b) Memberikan kemudahan pengembangan dan berinvestasi bagi penyiaran televisi swasta; Dalam batas-batas tertentu, kemampuan negara cukup terbatas dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat secara sehat, oleh karena itu, swasta dapat diberikan peluang mengisi kebutuhan informasi yang meningkat.

Peningkatan kualitas pelayanan informasi publik dilakukan dengan: (a) Meningkatkan pelayanan informasi multimedia yang lebih berkualitas; Para pejabat publik dapat berkomunikasi dengan masyarakat melalui teknologi dunia maya, yang antara lain dapat mengurangi hambatan-hambatan birokrasi; (b) Mengupayakan secara proaktif dalam penyediaan informasi yang lebih berorientasi pada permintaan dan kebutuhan nyata masyarakat; Pembukaan dan aktualisasi informasi pada situs-situs internet merupakan salah satu metode untuk memenuhi kebutuhan akan informasi dari tangan pertama; (c) Membentuk lembaga juru bicara kepresidenan (*press secretary*) yang sekaligus berperan sebagai jurubicara pemerintah; Dalam suatu iklim pers bebas di sebuah negara demokrasi, maka pemerintah umumnya sangat memerlukan lembaga khusus yang mampu menjelaskan kebijakan pemerintah, mampu memahami kecenderungan-kecenderungan pendapat publik (*public opinion*) terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, serta memiliki sensitivitas terhadap masukan (*feedback*) masyarakat kepada pembuat kebijakan.

Membangun Pertahanan dan Keamanan

Prioritas Pembangunan. Prioritas pembangunan bidang pertahanan dan keamanan didedikasikan untuk dapat mencegah dan menghadapi ancaman terhadap negara dan bangsa serta menyelesaikan berbagai permasalahan keamanan. Oleh karena itu prioritas bidang Pertahanan, antara lain adalah :

1. Penyelesaian permasalahan separatisme di NAD, Maluku dan Papua secara komprehensif yang mencakup dimensi ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya serta pertahanan dan keamanan.
2. Meningkatkan kesadaran bela negara bagi warga negara Indonesia melalui pendidikan kesadaran bela negara dan wajib Militer secara selektif.
3. Meningkatkan upaya diplomasi dan image building tentang kepentingan Indonesia terhadap stabilitas kawasan dan regional serta menjalin kerjasama pertahanan dengan negara tetangga dan negara-negara lainnya yang berlandaskan atas kedaulatan masing-masing negara.
4. Membangun pos-pos pertahanan beserta penggelaran kekuatan pertahanan di wilayah perbatasan dan pulau terluar.
5. Meningkatkan penggelaran kekuatan pertahanan di laut untuk melindungi wilayah teritorial dan Zone Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Meningkatkan upaya deteksi dan perlindungan Zona Udara Indonesia sebagai bagian integral dari pertahanan darat dan laut.
6. Meningkatkan kemampuan TNI dalam mencegah, menangkal dan menindak kekuatan-kekuatan yang mengancam pertahanan negara sehingga tetap terjaga keutuhan NKRI yang mencakup dimensi alusista, material, personil serta prasarana dan sarana.

7. Memperbaiki tingkat kesejahteraan prajurit TNI beserta keluarganya yang disertai dengan meningkatkan kepatuhan dan disiplin prajurit terhadap hukum.
8. Meningkatkan kemampuan industri pertahanan nasional yang disertai dengan meningkatkan penggunaan dan pemanfaatan hasil industri nasional oleh kekuatan pertahanan.

Sementara prioritas pembangunan **di bidang Keamanan**, antara lain yang dianggap sangat mendesak adalah meliputi :

1. Melakukan perubahan sistem pendidikan bagi calon anggota Polri untuk membentuk polisi yang berkarakter sipil.
2. Membangun pemolisian masyarakat untuk mendekatkan polisi dengan masyarakat agar terbina kerjasama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
3. Meningkatkan kemampuan Polri dalam mencegah, menangkal dan menindak kejahatan melalui interdiksi darat, laut maupun udara.
4. Pembinaan keamanan laut guna mencegah, menangkal dan menindak pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan secara illegal baik oleh pihak dalam negeri maupun pihak luar negeri.
5. Meningkatkan profesionalisme Polri melalui pembinaan kinerja Polri dengan meningkatkan kompetensi pelayanan inti, manajemen operasional, pengembangan sumber daya organisasi dan manajemen perilaku serta pemantapan struktur organisasi kepolisian.
6. Memperbaiki tingkat kesejahteraan personil Polri beserta keluarganya yang disertai dengan meningkatkan kepatuhan dan disiplin prajurit terhadap hukum.

Program Pembangunan. Agar prioritas-prioritas tersebut dapat dijalankan dengan komprehensif dan terpadu, maka dalam operasionalnya diwujudkan dengan program-program taktis dan strategis sebagaimana berikut:

Program Pengembangan Kekuatan Pertahanan (Profesionalisme TNI). Melanjutkan kemajuan sebelumnya, program ini tetap ditekankan pada upaya meningkatkan profesionalisme TNI melalui pembangunan sumber daya manusia TNI, organisasi, doktrin militer, serta sistem senjata. Peningkatan profesionalisme TNI ini penting dan mendesak ketika dihadapkan pada berbagai tantangan pertahanan baik yang terjadi di dalam negeri seperti gerakan separatisme yang terjadi di Aceh dan Papua maupun yang berasal dari luar negeri seperti gangguan wilayah perbatasan, penerbangan gelap, atau pelayaran illegal.

Program Pembinaan Bela Negara. Program ini untuk meningkatkan kesadaran warga negara dan menyikapi arus reformasi serta terjadinya perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi menuju sistem pemerintahan desentralisasi yang telah berdampak pada menurunnya kemauan warga negara. Perbedaan pemahaman terhadap pelaksanaan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah memunculkan berbagai permasalahan kedaerahan berkaitan dengan meningkatnya wewenang daerah untuk mengatur wilayahnya sendiri. Menonjolnya kepentingan daerah yang terkesan di atas kepentingan nasional, telah memunculkan konflik kepentingan diantara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Keadaan ini berdampak pada munculnya primordialisme di masyarakat, di mana seringkali masyarakat melupakan kepentingan nasional. Keadaan ini apabila tidak ditangani secara baik akan membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh karena itu,

pembinaan bela negara untuk menciptakan budaya kewarganeraan (*civic culture*) sangat dibutuhkan sebagai *spirit* kebangsaan dalam suasana desentralisasi dan penerapan otonomi daerah.

Program Pengembangan Dukungan Pertahanan (SDA, Industri Pertahanan & SDB). Program ini diarahkan pada upaya meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam, industri pertahanan, dan sumber daya buatan untuk dapat dimanfaatkan secara optimal dalam rangka mendukung sistem pertahanan nasional. Ketergantungan sistem senjata TNI pada industri pertahanan luar negeri yang rawan embargo, menjadikan pembangunan industri pertahanan dalam negeri memiliki nilai strategis untuk mendukung sistem senjata TNI. Di samping itu, dengan pengutamaan terhadap pemanfaatan industri dalam negeri secara langsung maupun tidak langsung akan mendukung perkembangan industri nasional dan mampu melakukan penghematan devisa untuk pembelian alutsista dari luar negeri.

Program Penegakan Keamanan di Laut. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, laut Indonesia memiliki fungsi yang sangat penting bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu laut sebagai media pemersatu bangsa, laut sebagai media perhubungan, laut sebagai media sumber daya, laut sebagai media pertahanan dan keamanan, serta laut sebagai media diplomasi. Meningkatnya gangguan keamanan di laut akhir-akhir ini sebagai akibat tidak efektifnya penegakan hukum dan keamanan di laut telah menyebabkan berbagai kerugian negara baik secara materiil dengan hilangnya sumber daya kelautan dan secara immateriil dengan terlanggarnya kedaulatan dan kewibawaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu program Penegakan Keamanan di Laut menjadi penting artinya apabila dihadapkan pada kemampuan negara yang masih terkendala oleh sistem kelembagaan dan sistem konstitusi yang mengaturnya.

Program Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan Transnasional. Kejahatan transnasional meliputi terorisme, pencucian uang (*money laundering*), narkoba dan obat-obatan berbahaya/terlarang, pembajakan, perdagangan dan penyelundupan manusia (*people smuggling*), penyelundupan senjata (*arms smuggling*), serta berbagai bentuk kejahatan transnasional yang baru antara lain penipuan menggunakan kartu kredit, penipuan dengan menggunakan modus pemalsuan identitas kapal dan awaknya (*phantom ship fraud*), pemalsuan barang dan dokumen perjalanan (*fraudulent travel documents*), dan *trafficking* perempuan dan anak-anak. Terorisme global sebagai salah satu kejahatan transnasional dalam beberapa tahun belakangan ini kejadiannya cenderung meningkat baik yang terjadi di dalam negeri maupun di dalam negeri. Sebagai negara yang seringkali disorot oleh pihak luar sebagai negara yang dituduh memiliki sel-sel terorisme, telah menempatkan Indonesia pada posisi sulit dalam pergaulan internasional. Keadaan ini apabila tidak dikelola dan ditangani secara baik akan berdampak pada semakin sulitnya upayaupaya pemulihan perekonomian Indonesia. Oleh karena itu program Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan Transnasional menjadi penting artinya apabila dihadapkan pada upaya menciptakan kondisi keamanan dalam negeri, regional, maupun internasional.

Program Pengembangan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Meskipun berbagai langkah pembangunan keamanan dan ketertiban masyarakat secara terus menerus dilakukan, namun gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat cenderung makin meningkat sebagai dampak krisis yang berkepanjangan. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang belum membaik telah mendorong sebagian masyarakat yang tidak mampu mengatasi kesulitan hidupnya untuk melakukan tindakan-

tindakan yang melanggar hukum. Di sisi lain, adanya perbedaan kondisi sosial yang mencolok di masyarakat telah menimbulkan kesempatan dan kemauan masyarakat untuk melakukan tindak kejahatan. Oleh karena itu, program Pengembangan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat merupakan program yang masih layak dilanjutkan untuk secara terus menerus menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban di masyarakat.

Program Pengembangan Kekuatan Polri (Profesionalisme Polri). Keberhasilan polisi dalam mengungkap dan menangani tindak kejahatan sangat ditentukan oleh profesionalisme polisi serta dukungan dan kerjasama dengan masyarakat. Untuk itu kepercayaan masyarakat perlu ditumbuhkan dengan meningkatkan profesionalisme aparat kepolisian dalam melaksanakan tugas pengayoman masyarakat dan penegakan hukum. Profesionalisme kepolisian ditingkatkan melalui penyempurnaan sistem seleksi, sistem pendidikan dan pelatihan, alat peralatan, dan peningkatan kesejahteraan anggota polisi beserta keluarganya. Oleh karena itu program Pengembangan Kekuatan Polri menjadi penting artinya apabila dihadapkan pada tantangan keamanan dan ketertiban masyarakat yang cenderung kurang kondusif bagi berlangsungnya aktivitas masyarakat.

Oleh karena itu, arah pembangunan partai-partai politik harus mengacu pada kondisi dan prioritas pembangunan di atas. Konflik internal partai politik telah menunjukkan bahwa partai politik cenderung memfokuskan pada kepentingan kekuasaan dan jatah perolehan suara, minim dalam pembangunan demokratisasi dalam tubuh partai dan menseirinkan arah pembangunan politik, pertahanan dan keamanan secara nasional.